

# LIBERALISME DALAM WACANA KEISLAMAN BIDANG IDEOLOGI HUKUM, POLITIK DAN PENDIDIKAN

Mohammad Thoha<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Sebagai agama besar, Islam selalu dituntut untuk bisa tampil dengan wajah yang mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi ruang dan waktu. Meskipun demikian, Islam tidak boleh larut kedalam warna apapun dalam mengawal ajarannya yang senantiasa berorientasi kepada perbaikan moralitas dan pemersatu umat. Oleh karena itu, dinamika pergerakan pemikiran yang menampilkan banyak varian, justeru harus dijadikan bukti kebesaran Islam itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan mengandung *rahmah*. Menjadi naif sekali jika sedikit akan mengantarkan umat Islam yang besar ini pada perpecahan yang menceraiberaikannya.

Liberalisme sebagai bagian dari dinamika diskursus keagamaan kontemporer, memberikan contoh pemahaman bahwa agama mampu dijelaskan dengan banyak wajah (*multiface*), yang dalam bahasa Amin Abdullah, justeru mampu membuktikan bahwa agama bukan saja murni membahas tentang ketuhanan, kepercayaan, keimanan, *credo*, pedoman hidup, *ultimate concern* dan seterusnya. Lebih dari itu, agama juga harus mampu membaca keterkaitan persoalan yang ada dengan historis kultural yang melatarbelakangi setiap permasalahan sosial terjadi. Dengan pembacaan yang demikian, maka agama menjadi sesuatu yang terkait erat dengan “kepentingan” masyarakat secara umum, tidak lagi disesuaikan dengan perspektif pribadi dan kelompok.<sup>2</sup> Jika direnungkan, kemunculan keragaman gerakan, bahkan keragaman ideologi keberagamaan, dikarenakan kesadaran pemahaman bahwa agama tidak lagi dipahami sebatas mengatur masalah kepercayaan pada ketuhanan (*pure sciences*), tetapi agama telah dipahami lebih dari itu, agama juga memuat ilmu-ilmu terapan (*applied sciences*).<sup>3</sup>

Mengkaji gerakan liberalisme, sebenarnya tidak boleh dilepaskan dari membahas variasi kemunculan sikap keberagamaan kaum muslimin setelah kontak dengan dunia Barat. Persinggungan pertama umat Islam dengan Barat dimulai dengan kedatangan Napoleon Bonaparte ke Mesir pada abad XVIII Masehi, yang menimbulkan respon

---

<sup>1</sup>Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan Madura.

<sup>2</sup>Amin Abdullah, “Pengantar: Dinamika Agama Antara Profanitas dan Sakralitas” dalam Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2006), 5.

<sup>3</sup>Ibid, 7-9.

berbeda di internal umat Islam. Satu sisi secara tegas menolak pengaruh Barat, selanjutnya golongan ini dikenal dengan kaum tradisional, sementara di sisi lain ada yang membaca sisi manfaat dari persinggungan Islam dan Barat tersebut, setidaknya dari sisi rasionalisasi pemahaman keagamaan. Golongan terakhir ini yang kemudian dikenal dengan kaum liberalisme.<sup>4</sup> Tulisan ringkas ini akan memahami gerakan liberalisme dalam perspektif historis dan ideologis.

## **B. Pembahasan : Memahami Liberalisme**

Liberalisme berasal dari kata *liber*, bahasa Latin, yang berarti bebas atau merdeka. Dalam pengertian terminologi pemikiran, liberalisme digunakan untuk menunjukkan sikap anti feodal, anti kemapanan, rasional, bebas merdeka dan berpikir luas.<sup>5</sup> Dalam makna lebih luas, liberalisme diartikan sebagai sebuah paham atau keyakinan dalam perspektif filosofis yang mendasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah milik setiap individu yang bersifat alami. Kebebasan dan persamaan hak tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti berkeyakinan atau keberpihakan terhadap ajaran agama tertentu, termasuk cara menjalankan keyakinannya tersebut, berpolitik atau menentukan sistem kekuasaan, bertransaksi dalam perekonomian dan sebagainya. Dalam hal politik, kebebasan itu sendiri bukan sebagai sarana mencapai tujuan politik, namun itu menjadi tujuan politik itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam ranah politik, paham liberalisme menolak dan menentang keras sistem sentralisme dan absolutisme kekuasaan. Sedangkan dalam bidang ekonomi, liberalisme berafiliasi kepada sistem pasar bebas. Pemerintah tidak boleh mengintervensi pasar. Dalam hal ini liberalisme hampir mirip dengan madzhab ekonomi kapitalis. Di wilayah sosial, liberalisme menghapus adanya dikotomi hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan liberalisme, perempuan memiliki kesetaraan derajat dengan laki-laki. Paham ini menganut sikap kesetaraan gender, emansipasi wanita dan menghapus kontrol sosial terhadap individu. Sedangkan dalam ranah agama dan keyakinan, liberalisme menganut

---

<sup>4</sup>Baca Amin Rais, "Kata Pengantar" dalam David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta : LKiS, 1997), vii.

<sup>5</sup>Syamsuddin Arif, "Memahami Liberalisme Akhir Zaman" dalam [www.akhirzaman.info/menokonspirasi/](http://www.akhirzaman.info/menokonspirasi/), diakses 7 Juni 2013.

<sup>6</sup>Coady CAJ, "Distributive Justice" dalam Goodin (ed.), *A Companion To Contemporary Political Philosophy* (tt. : Blacwell Publishing, 1995), 440.

kebebasan untuk meyakini, mengamalkan dan menganut ajaran agama apapun, karena agama adalah hal bersifat privat.<sup>7</sup>

Liberalisme mencita-citakan pembentukan masyarakat dengan memiliki kebebasan mutlak. Masyarakat seperti dicirikan dengan kebebasan berpikir pada setiap individu dan menolak pembatasan, baik oleh sistem kuasa atau pemerintah maupun oleh agama.<sup>8</sup> Paham liberalisme selanjutnya melahirkan paham-paham kebebasan yang lain, seperti sekulerisme, demokrasi dan modernisme.<sup>9</sup> Secara umum pokok-pokok ajaran liberalisme adalah (1) menjunjung tinggi kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (2) masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sebuah komunitas, harus diselesaikan dengan cara diskusi dan musyawarah untuk menghilangkan egoisme individu (3) pemerintah, sebagai simbol kuasa, tidak boleh berjalan dengan kehendaknya sendiri. Rakyat sebagai yang diperintah harus diperhatikan arah keinginan dan aspirasi kehendaknya (4) mengupayakan hukum berjalan secara adil atau *the rule of law*. Negara harus mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Sumber aturan yang berupa undang-undang harus menjamin kesamaan setiap individu di muka umum (5) negara hanya diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat secara bersama-sama (6) liberalisme sama sekali tidak menerima ajaran dogmatis (*refuse dogmatism*).<sup>10</sup>

### **Historisitas Geneologi Liberalisme**

Liberalisme, jika dipahami dengan kata kunci rasionalisasi pemikiran, maka akan berujung kepada upaya rasionalitas pemahaman keagamaan yang dimotori kaum Mu'tazilah pada periode awal sejarah Dinasti Abbasiyah dan diteruskan oleh para filosof muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan sebagainya. Demikian pula pada generasi berikutnya ada Ibn Taimiyah (1263-1328M) yang hidup pada pemerintahan sekuler Dinasti Mamluk.<sup>11</sup> Saat itu, Dinasti Mamluk memberlakukan dua standar hukum dalam masalah *syari'ah*. Di satu sisi mereka menghukumi masalah dengan pendekatan hukum al-Qur'an dan hadits, namun di sisi yang berbeda mereka memberlakukan hukum yang diputuskan berdasarkan pertimbangan Sulthan, yang tidak jarang keluar dari teks al-Qur'an dan hadits.

---

<sup>7</sup>Syamsuddin Arif, "Memahami Liberalisme Akhir Zaman," Ibid.

<sup>8</sup>Sukarna, *Ideologi : Studi Ilmu Politik* (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), 13.

<sup>9</sup>Disarikan dari [id.wikipedia.org/wiki/liberalismee](http://id.wikipedia.org/wiki/liberalismee), diakses 7 Juni 2013.

<sup>10</sup>Sukarna, *Ideologi : Studi Ilmu Politik*, 20-41.

<sup>11</sup>Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis* (Jakarta : Penerbit Paramadina, 2001), 429.

Pada masa berikutnya ada Ibnu Khaldun (1322-1406), dikenal sebagai Bapak Sosiologi Islam, yang telah menawarkan konsep rekonstruksi hukum dengan memadukan hukum *Ilahiyah* atau al-Qur'an dan hadits dengan solidaritas alamiyah, demi kemaslahatan umat atau *common goods*. Demikian pula pada era Kesultanan Turki atau Ottoman, dikenal beberapa ulama pembaharu, seperti al-Sinasy, Ziya Pasha dan Namik Kamal. Semenantara pada masa yang sama, di Mesir ada Rifaat Badawy, Rafi al-Thahthawy, Khyr al-Din Pasha dan Butrus Busthamy. Mereka, dalam setiap forum ilmiah, selalu menganjurkan bahwa para ulama harus melihat jaman sudah keluar dari pakem tradisional dan bergeser kepada tuntutan modernitas. Oleh karena itu hukum harus diformulasikan seiring dengan kebutuhan perkembangan jaman. Hukum harus lepas dari jepitan paradigma yang kaku, *rigid* dan tidak berkembang.<sup>12</sup> Gerakan pemikiran seperti ini di Indonesia kemudian dikenal dengan gerakan Islam rasional, Islam eksklusif, Islam pembaharuan dan sebagainya, yang diperjuangkan oleh Nurcholis Majid, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Dawam Rahardjo, Masdar Farid Mas'udi, Komaruddin Hidayat, Nasaruddin Umar, Zainun Kamal, Kautsar Azhari, Amin Abdullah dan lainnya.<sup>13</sup>

Sebelum itu, di India telah dikenal pemikir Islam liberal seperti Sir Hamilton Gibb yang dengan rinci mengeksplorasi pemikiran Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang terkenal fleksibel dalam memahami teks ajaran agama. Poin-poin pemikiran Ahmad Khan selanjutnya dijadikan pijakan akademis dalam pengembangan kurikulum di Universitas Aligarh, terlebih setelah kekuasaan Ottoman di Turki runtuh pada tahun 1924.<sup>14</sup> Di Turki sendiri, sejak tahun 1949, upaya liberalisasi pemikiran dilakukan dengan cara merombak kurikulum Fakultas Teologi di Universitas Ankara. Kurikulum diarahkan kepada kebebasan berpikir dan mengeksplorasi pemahaman teks secara mandiri. Demikian juga pada tahun 1971 upaya yang sama dilakukan di fakultas Islamic Studies Universitas Erzurum. Langkah ini berlanjut pada beberapa perguruan tinggi yang lain. Sama dengan yang terjadi di Turki, di Sudan, upaya liberalisasi dilakukan dengan cara melakukan amandemen UU Syari'at. Hal ini dilakukan sejak kemunculan beberapa tokoh politik yang

---

<sup>12</sup>Ibid, 430-431.

<sup>13</sup>Ibid, 426. Setelah itu dilanjutkan generasi berikutnya, seperti Bachtiar Effendi, Fachry Ali, Budi Munawar Rachman, Saiful Mujani, Mun'im A. Sirry, Ahmad Gaus AF, Lutfy al-Syaukani dan Uilil Absar Abdalla. Baca Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, 357-358. Baca juga William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London : Routledge, 1988), 67.

<sup>14</sup>Ibid, 62-64.

beraliran liberal, seperti Shadiq al-Mahdy yang mempelopori gerakan rasionalisasi al-Qur'an dan hadits dengan bendera Gerakan al-Anshar.<sup>15</sup>

Untuk mencirikan sebuah gerakan termasuk pada katagori liberal, Charles Kurzman memberikan kata kunci dengan memihak kepada keterbukaan dan keluar dari keterbatasan berpikir. Secara lebih rinci, suatu gerakan pemikiran dianggap memenuhi kriteria liberal jika selalu memperjuangkan (1) melawan teokrasi, karena agama harus diposisikan sebagai hal yang privat, tidak harus diatur dalam sistem politik tertentu (2) mendukung gagasan demokrasi, karena tidak ada satupun yang boleh merampas kemerdekaan seseorang, termasuk dalam hal berkeyakinan, berserikat dan bekerja (3) membela hak-hak perempuan, karena hal ini menjadi misi utama syari'at agama Islam (4) membela hak-hak non-muslim, karena Islam mengajarkan perdamaian dan kesamaan hak umat manusia (5) membela kebebasan berpikir, karena imajinasi dan kreasi adalah anugerah Tuhan yang harus diapresiasi (6) membela gagasan kemajuan, mengingat Islam mengajarkan umatnya untuk terus maju dan berkembang.<sup>16</sup>

### **Membaca Argumentasi Liberalismee**

Perbedaan esensial dari hasil penafsiran kaum tradisonalis<sup>17</sup> dengan liberalis terhadap teks al-Qur'an dan hadits tidak lepas dari corak dan metode yang digunakan. Kaum liberal menggunakan pendekatan otoritatif terhadap teks yang digunakan. Dalam makna seperti ini teks akan hidup dan fleksibel serta berbicara dengan kondisi dan situasi yang ada (*'illat hukum*). Dengan demikian teks menjadi hidup dan eksklusif, tidak *rigid* dan kaku.<sup>18</sup> Di samping itu, teks juga dibaca dengan menggunakan kajian hermenutika dan pendekatan historis. Dalam hal ini, teks terbagi ke dalam tiga kondisi, yaitu (1) *original text*, yaitu pada masa Nabi SAW yang masih asli dan otentik (2) *change text*, yaitu pada masa sahabat yang sangat mungkin sudah mengalami interpretasi dari sahabat sendiri (3) *development text*, yaitu masa abad X sampai XI Masehi yang berupa kemunculan penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan hadits. Pada masa ini tentu saja subyektivitas

---

<sup>15</sup>Ibid, 65-66.

<sup>16</sup>Baca selengkapnya di "Bagian Pengantar" dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam A Sourcebook* (New York : Oxford University Press, 1998).

<sup>17</sup>Kaum tradisonalis sering juga disebut dengan fundamentalis, yaitu kelompok yang selalu memahami teks dengan pendekatan reaksionis, apa adanya, literer, otoriter, anti modernisasi, tidak kosmopolitan dan dalam bahasa Budi Munawar Rachman, mungkin saja paranoid. Tentang pergulatan ideologi fundamentalis dan liberalis ini, baca Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, 426.

<sup>18</sup>Ibid, 413. Baca juga Mahmud Muhammad Thaha, "The Second Message of Islam" dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam* (Oxford : Oxford University Press, 1998), 270-283.

*mufassir* mewarnai corak penafsirannya dan mungkin saja satu tafsir akan berbeda dengan tafsir lain tentang satu teks ayat yang sama.<sup>19</sup>

Lebih dari itu semua, Nashr Hamid Abu Zayd menulis bahwa al-Qur'an itu berada di dalam *mushaf* yang tidak berbicara, sedangkan yang berbicara atas nama al-Qur'an adalah orang-orangnya.<sup>20</sup> Manusia dibekali kemampuan untuk melakukan interpretasi dari teks yang ada. Dalam hal ini, ada ungkapa menarik dari Ahmad Wahib, yaitu :

Aku belum tahu tentang Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam dari HAMKA, dari Natsir, dari Abduh dan lain sebagainya. Aku tidak puas. Aku belum menemukan yang kukari, Islam menurut Allah yang membuatnya. Setidaknya menurut akal sehatku itu berasal dari Allah.<sup>21</sup>

Liberalisasi pemikiran, yang selanjutnya dikenal dengan istilah Islam liberal, setidaknya dalam pandangan Jaringan Islam Liberal atau JIL,<sup>22</sup> diposisikan sebagai alat bantu untuk menghadirkan Islam yang ramah, hidup dan selalu berdialog dengan konteks secara produktif dan progresif. Islam liberal juga diposisikan sebagai penyelamat dari stigma Islam yang indoktrinasi, konservatif dan dogmatis.<sup>23</sup> Islam akan menjadi kecil di tangan mereka yang memahami adanya pembatasan penafsiran hanya bagi golongan tertentu, seperti halnya pra-syarat *mufassir* yang dirumuskan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuty dan al-Zarkazy.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam pandangan kaum liberalis, Islam liberal datang sebagai reaksi ideologis yang mencerahkan dan menawarkan pendekatan yang rasional, tidak *rigid*, skriptural dan progresif.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup>M. Arkoun, *al-Fikr al-Islamy : Qira'at 'Ilmiyyat*, terj. Hasyim Shalih (Beirut : Markaz al-Inma' al-Qawmy, 1990), 86-90. Bandingkan dengan Abdullah Ahmed al-Na'im, "Shariah and The Basic Human Right" dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam*, 222-238.

<sup>20</sup>Nashr Hamid Abu Zayd, *al-Imam al-Shafi'iy wa Ta'sis al-Ideolojiyat al-Wasatiyyat* (Kairo : Daar al Ma'arif, 1992), 7.

<sup>21</sup>Ahmad Wahib, *Pergerakan Pemikiran: Catatan Harian Ahmad Wahib* (Jakarta : LP3ES, 1983), 22-23.

<sup>22</sup>JIL adalah nama sebuah gerakan dan aliran pemikiran yang bermula dari sebuah ajang *kongkow-kongkow* di Jalan Utan Kayu 69H, Jakarta Timur. Tempat ini sejak 1996 menjadi ajang pertemuan para seniman sastra, teater, musik, film dan seni rupa. Di tempat itu juga Institut Studi Arus Informasi (ISAI), yang salah satu motor utamanya Ulil Abshar Abdalla berkantor. Bersama Goenawan Mohammad, mantan pemimpin redaksi *Tempo*, serta sejumlah pemikir muda seperti Ahmad Sahal, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib dan Saiful Mujani, Ulil kerap menggelar diskusi bertema pembaruan pemikiran Islam. Setelah berdiskusi sekian lama, pada akhir 1999 Ulil dan kawan-kawan sepakat memperkenalkan serta mengkampanyekan pemikiran mereka dengan bendera Islam liberal. Lalu untuk mengintensifkan kampanyenya mereka membentuk wadah Jaringan Islam Liberal (JIL) pada Maret 2001. Dengan ditunjang kucuran dana dari Asia Foundation, kampanye Islam liberal gencar dilancarkan melalui berbagai cara, mulai dari forum kajian dan diskusi, media cetak hingga media elektronik. Media internet juga tidak ketinggalan digarap mereka. Mula-mula dengan membuat forum diskusi internet (*mailing list*), kemudian dilanjutkan dengan membuat situs web, alamatnya [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com). Baca selengkapnya di <http://muslimdaily.net/opini/wawasanislam/islam-liberal-sekularis-berkedok-muslim.html#.UZ81WVIGXxE>. Diakses 26 Mei 2013.

<sup>23</sup>Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, 30.

<sup>24</sup>Ibid, 33.

<sup>25</sup>Ibid, 355. Baca juga David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, 28.

## **Liberalisme dalam Ideologi Hukum**

Gerakan Islam liberal mengajarkan umat Islam untuk keluar dari “pakem” elitisme dan kekakuan. Islam harus dipahami dengan horizon yang sangat luas. Cakrawala Islam mencakup segala aspek kondisi dan situasi. Demikian pula dalam menafsirkan teks al-Qur’an dan hadits, tidak boleh terpaku kepada model penafsiran ulama terdahulu. Saat ini kondisi sudah berbeda dengan para ulama periode awal tersebut. Oleh karena itu, harus ada penafsiran ulang dari teks al-Qur’an dan hadits yang begitu universal tersebut. Sebagai studi kasus adalah dalam menafsirkan relasi laki-laki dengan perempuan, gender dan feminisme. Dalam pemahaman kaum rasionalis, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai “orang belakang” yang harus selalu dinomorduakan. Peran mereka dalam ruang publik atau gender tidak harus disamakan dengan peran mereka secara biologis, yaitu sebatas mengandung, melahirkan dan menyusui. Lebih dari itu, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk mengisi ruang publik dengan berbagai perannya, seperti pendidik, pengusaha, pejabat, politisi dan sebagainya. Hal ini yang diperjuangkan para pemikir rasional seperti Riffat Hasan, Fetima Mernissi, Nawal Sa’adawy, Amina Wadud, Lies Marcos Natsir, dan di Indonesia ada Siti Ruhaini, Nurul Agustina, Wardah Hafidz dan sebagainya.<sup>26</sup>

Sebagian masyarakat di Indonesia belum mampu membedakan antara feminisme dan gender. Sebenarnya ketika perempuan dikaitkan dengan feminisme, maka itu tidak lebih hanya membicarakan perempuan dari sisi fisik yang memang substansinya berbeda dan diciptakan tidak sama dengan laki-laki. Namun jika sudah menyinggung hal gender, maka konotasinya harus bergeser kepada pembacaan kondisi psikologi, rasio, intelegensi, hasrat dan imajinasi, yang tentu saja semua manusia memilikinya tanpa harus dibedakan laki-laki dan perempuan.<sup>27</sup> Sebenarnya perempuan telah berhasil memainkan peran sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Peran ganda yang sulit (*difficult double commitment*) harus dijalankan perempuan menuntut keberhasilan yang sama dari dua belah sisi, yaitu di satu sisi perempuan harus mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang berhasil menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga untuk suami dan anak-anaknya, di peran yang lain, di luar rumah perempuan dituntut juga untuk memerankan diri sebagai lambang harmonisasi keluarga yang harus tampil elegan, anggun dan menampilkan kewibawaan

---

<sup>26</sup>Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, 394.

<sup>27</sup>Baca selengkapnya Sa’diyya Shaik, “Transforming Feminism : Islam, Women and Gender Justice” dalam Omid Safi (ed.), *Muslim Progressive On Justice, Gender and Pluralisme* (Oxford : Oneworld, 2003), 155-157.

keluarga, di samping juga tidak jarang masih ditambah beban tugas dan profesi lainnya di tengah publik. Peran ganda inilah yang telah dengan gemilang dimainkan oleh sarjana muslimah kita yang telah berhasil dengan prestasi akademis dan sosial, namun tetap bijaksana sebagai ibu rumah tangga.

Secara ringkas, hukum harus diformulasikan untuk selalu menyeimbangkan kepentingan bersama demi mewujudkan misi *rahmatan lil 'alamin*. Dengan model penafsiran semacam ini, tentu saja perbedaan akan terjadi secara distingtif dengan kaum tradisionalis. Dalam hal ini, sebagai contoh, kaum tradisionalis yang dalam hal ini dapat diambil sampel penafsiran tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh Imam al-Nawawy al-Bantany dalam kitab *Uqud al-Lujjyin*, begitu membatasi hak perempuan terhadap laki-laki. Perempuan diposisikan sebagai kaum yang “tergantung” belas kasihan kaum laki-laki, baik kesejahteraan di dunia, apalagi keselamatan di akhirat kelak. Dalam makna seperti ini, perempuan diposisikan sebatas “pelengkap” laki-laki. Perempuan digambarkan sebagai manusia yang tidak memiliki hak kemanusiaan.<sup>28</sup> Sebaliknya kaum rasionalis atau liberal memandang adanya hak kesetaraan kaum perempuan dengan laki-laki. Semuanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan menentukan keinginan.

### **Liberalisme dalam Ideologi Politik**

Sejak pembubaran sistem *khilafah Islamiyyah* oleh Musthafa Kemal al-Taturk di Turki tahun 1924, maka reaksi yang muncul tentang politik Islam terbagi ke dalam dua kelompok besar. *Pertama* kelompok tradisionalis fundamentalis, yang tetap menganggap bahwa kaum muslim harus berada dalam satu komando *khalifah*, sementara kelompok *kedua* yaitu pendapat kaum rasionalis-liberal menganggap bahwa bentuk kekuasaan politik memang diperlukan, tetapi tidak harus berada dalam bentuk khusus.<sup>29</sup>

Diskursus tentang sistem politik ini terus terjadi dan berkepanjangan sampai saat ini. Di Mesir, pemikiran Abd. Raziq yang tertuang dalam buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, mendapat banyak kritik.<sup>30</sup> Raziq dianggap sebagai pemikir politik liberal paling

---

<sup>28</sup>Untuk lebih lanjut penolakan argumentatif kaum liberal tentang kitab *'Uqud al-Lujjyin* dalam Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, 406-408.

<sup>29</sup>William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, 65-68.

<sup>30</sup>Setidaknya buku tersebut memperoleh respon penolakan dari pemikir-pemikir lain seperti Albert Hourani yang menulis buku *Arabic Thought in Liberal Age* dan Muhammad 'Imarah dengan buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm li 'Abd al-Raziq*. Kedua buku ini secara tegas menolak konsep kekuasaan yang diserahkan kepada rakyat sipil tanpa adanya pusat komando *khalifah*. Baca selengkapnya diskursus pertarungan ideologi politik



modern di Mesir tahun 1925. Dalam hal ini, Raziq sangat mengapresiasi langkah al-Taturk untuk membubarkan sistem *khilafah*, karena dianggap membelenggu dan bahkan mengecilkan Islam. Dalam pandangan Raziq, kaum muslim memang memerlukan saluran politik untuk mengantarkan kepada perjuangan bersama sebagai sebuah komunitas. Meskipun demikian, tidak perlu dibentuk suatu sistem politik yang mengikat seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini tidak mungkin, mengingat umat Islam yang begitu besar jumlahnya, pasti memiliki pilihan politik dan kultur politik yang beragam. Oleh karena itu, umat Islam tidak harus disatukan dalam satu komando politik.<sup>31</sup> Dalam hal ini, yang menjadi sumber kekuasaan adalah pilihan umat atau mandat atas *khalifah*, bukan individu *khalifah*-nya. Oleh karena itu mandat tersebut bisa diwujudkan dengan aklamasi atau *bay'at*, bisa juga memakai sistem pemilihan. Semua bentuk itu diserahkan kepada kehendak umat.<sup>32</sup> Oleh karena itu *khalifah*, *sulthan* atau presiden yang mendapat mandat hanya sebatas pelaksana syari'ah yang harus mengindahkan pengawasan umat.<sup>33</sup>

Fakta sejarah Islam, yang memotret perselisihan Imam Ali dengan Muawiyah dan kaum Khawarij dengan Qoramithah, titik tekan perselisihannya bukan masalah esensi doktrin ajaran agama, namun lebih kepada perbedaan opini politik untuk mengatur umat. Demikian pula perang yang terjadi antara Bani Umayyah dengan Bani Hasyimiyah, bukan masalah doktrin agama, tetapi lebih kepada perebutan kekuasaan yang bukan substansi ajaran agama, tetapi merupakan kepentingan pribadi atau golongan yang bersifat sesaat.<sup>34</sup> Akan menjadi naif sekali jika kepentingan pribadi diperjuangkan dengan cara mengatasnamakan agama.

### **Liberalisme dalam Ideologi Pendidikan**

Dalam dinamika Islam, akhir-akhir ini muncul wacana Islam liberal. Pendidikan liberal Islami atau pendidikan Islam liberal menjadi bagian yang selalu memancing diskursus yang sulit ditemukan titik singgungnya. Dalam pandangan sebagian tokoh, pendidikan Islam liberal adalah model atau paradigma pendidikan yang berwawasan bebas dan terbuka. Bebas di sini berarti kebebasan manusia untuk mengembangkan potensi

---

tersebut dalam Leonard Binder, *Islam Liberal Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 191.

<sup>31</sup>Ibid, 193.

<sup>32</sup>Muhammad Dzia al-Rayyis, *al-Islam wa al-Khilafat fi al-Ashr al-Hadits : Naqd al-Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Kairo : Maktabah Dar al-Thaqafat, 1972), 230.

<sup>33</sup>Ibid, 234.

<sup>34</sup>Leonard Binder, *Islam Liberal*, 23-35.

dirinya, yang berupa pengembangan individu, sedangkan terbuka adalah kemauan untuk bertoleransi terhadap tingkah laku, pikiran dan pendapat yang berbeda dengan dirinya. Sikap seperti ini akan melahirkan kearifan dalam menyikapi kemajemukan dan keragaman khazanah intelektual kaum muslim, yang sebenarnya jauh-jauh sebelumnya telah diprediksi oleh Nabi SAW bahwa dalam setiap perbedaan terkandung hikmah yang besar. Pendapat semacam ini secara otomatis menjadi antitesis pemikiran sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan Islam tidak boleh diseret mengikuti *trend* pemikiran kaum sekuler Barat. Dalam pandangan seperti ini, pendidikan liberal (liberalisme) akan mengarah kepada kapitalisme yang berimplikasi pemadatan waktu-ruang yang memiliki pengaruh kepada diorientasi dan sangat mengacaukan praktek-praktek politis, ekonomi, keseimbangan kekuasaan kelas dan juga kehidupan sosial dan budaya.<sup>35</sup> Para penganut paham multikulturalisme menolak pandangan semacam ini karena menurut mereka secara esensial identitas-identitas individu adalah sama, meskipun mereka dibedakan oleh beberapa gejala alamiah, seperti gender, orientasi seksual dan budaya. Namun perbedaan tersebut justru akan memberikan nuansa heterogenitas yang akan menciptakan soliditas dalam membangun peradaban dalam konteks sosial dan sejarah. Multikulturalisme akan melahirkan disentralisme yang bermakna penghapusan kelas-kelas dominan menuju kesamaan kesempatan dengan kaum minoritas.<sup>36</sup> Akhir dari semua ini adalah menciptakan iklim individualis yang jelas bertentangan dengan konsep kebersamaan (*al-tasawuy*) dalam ideologi Islam.

Dengan mengacu kepada pendapat pertama, Abudin Nata menulis bahwa pendidikan Islam liberal tidak harus dimaknai secara radikal, akan tetapi makna eksplisit dari pendidikan Islam liberal adalah pendidikan Islam perlu mengadakan pergeseran paradigma yang meliputi mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar pemecahan masalah, dari hapalan ke dialog, dari pasif ke *heuristik*, dari memiliki ke menjadi, dari mekanis ke kreatif, dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menuju menguasai metodologi yang kuat dan dari memandang ilmu sebagai hasil yang

---

<sup>35</sup>George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, terj. Muhammad Taufik (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2003), 284.

<sup>36</sup>Ibid, 324.

final menjadi memandang ilmu dalam dimensi proses.<sup>37</sup> Dalam kondisi seperti ini, pendidikan Islam liberal akan melahirkan cendekiawan yang tidak fanatis.<sup>38</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dipetakan adanya dikotomi pendidikan yang terbelenggu dan pendidikan yang dapat dianggap telah maju. Kelompok pertama dapat dicirikan sebagai (1) pola pembelajaran yang menjemukan (2) lembaga pendidikan dijadikan sebagai medan bisnis *profit oriented* (3) penyeragaman sistem atau sentralisasi, seperti dalam model ujian dan seragam siswa (4) guru berfungsi sebagai pengajar, bukan sebagai pendidik (5) kesejahteraan guru tidak diperhatikan<sup>39</sup> (6) marginalisasi mata pelajaran yang mengasah kepribadian, seperti pelajaran agama, olah raga dan seni.

Sedangkan sistem pendidikan yang sudah maju dapat dicirikan dengan (1) siswa sebagai subyek utama yang dapat menyebabkan aktualisasi ide-ide (2) memberdayakan basis pembelajaran masyarakat, seperti orang tua, lingkungan dan kelompok bermain (3) adanya transparansi keuangan (4) sumber keuangan tidak hanya dari orang tua siswa, akan tetapi sekolah memiliki badan usaha yang dapat menunjang kebutuhan sekolah (5) adanya perpustakaan di luar sekolah (6) adanya prioritas bagi anak tidak mampu.<sup>40</sup>

Konsep pendidikan yang dikembangkan secara terbuka akan melahirkan iklim demokratis dalam dunia pendidikan. Pendidikan demokratis akan menghasilkan anak didik yang menghadapi masalah-masalah hidup dengan alternatif-alternatif yang dikembangkan oleh kemampuan akal budi untuk mencari solusi terbaik.<sup>41</sup> Kegagalan pendidikan tidak jarang disebabkan oleh sistem yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi riil psikologi peserta didik. Dalam hal ini, Drost<sup>42</sup> mengidentifikasi faktor-faktor kegagalan pendidikan. *Pertama* adalah beban kurikulum. Kurikulum pendidikan yang dibebankan kepada siswa Indonesia diperkirakan melebihi kemampuan siswa untuk mampu mencerna dengan baik. Sebagai perbandingan, kurikulum SMP dan SMA yang diterapkan di Indonesia, hanya diikuti oleh 25% sampai 30% siswa pandai di Eropa dan Amerika, sedangkan di Indonesia

---

<sup>37</sup>Abuddin Nata, "Paradigma Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. I Thn. X (Desember 2002), 11-13. Baca juga Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 49.

<sup>38</sup>Ulil Abshar Abdallah, "Pendidikan Islam Liberal Tidak Mengajarkan Fanatisme Buta" dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. I Thn. X (Desember 2002), 78.

<sup>39</sup>Paulus Mujiran, *Pernik-Pernik Pendidikan : Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 89-91.

<sup>40</sup>Ibid, 92-95.

<sup>41</sup>HAR. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural* (Magelang : Indonesia Tera, 2003), 94.

<sup>42</sup>Nama lengkapnya adalah Josephus Ignatius Gerardus Maria Drost, S.J. lahir pada 1 Agustus 1925 di Batavia. Dia adalah mantan rektor IKIP Sanata Dharma (1968-1976) dan mantan Direktur SMA Kanisius Jakarta (1977-1986). Dia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap persoalan pendidikan di Indonesia.

kurikulum seberat dan sesulit itu harus diikuti oleh 100% peserta didik. Hal ini akan menghilangkan semangat dan justru akan menanamkan frustrasi bagi siswa.<sup>43</sup>

*Kedua* adalah iklim yang menerapkan kebijakan bahwa siswa tidak boleh salah. Dalam pendidikan di Indonesia, sering dijumpai ketika seorang siswa melakukan kesalahan, maka langsung dimarahi. Kebiasaan seperti ini akan mendidik anak untuk tidak bertanggung jawab. Mereka lebih senang untuk menunggu perintah daripada mereka menanggung resiko salah. Sikap seperti ini akan membuat anak takut untuk berinisiatif dan akan menghambat kreativitas mereka. Seharusnya jika mereka melakukan kesalahan, maka guru hendaknya membimbing mereka untuk belajar dari kesalahan tersebut. *Ketiga* adalah kesalahan dalam memaknai sikap tenggang rasa. Siswa merasa bahwa mereka harus senantiasa serasi dan seimbang dengan yang lain, tidak boleh menonjol dan melebihi yang lain. Ironinya, sikap seperti ini dibiarkan oleh lingkungan belajarnya oleh guru dan keluarga. Hal ini tidak akan melahirkan iklim kompetitif yang sehat. Siswa beranggapan tidak ada guna belajar terlalu serius, karena nanti juga harus sama dengan yang lain. Jadi yang menjadi tolok ukur adalah orang lain, bukan diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, siswa tidak pernah dilatih mengeluarkan emosi yang terkendali, karena hal itu langsung dikekang.<sup>44</sup>

*Keempat* adalah mengedepankan egosentris dalam diri siswa jika mereka berhubungan dengan dunia luar. Sebagai contoh adalah ketika mereka merasa melakukan kesalahan kepada orang lain, maka mereka akan melarang kepada temannya untuk tidak berbuat seperti itu, karena adanya rasa tidak enak. Sikap seperti ini lebih mementingkan diri sendiri daripada akibat yang diterima orang lain.<sup>45</sup> Sebagai praktisi pendidikan, Drost sering mengamati perilaku peserta didik di Indonesia yang menurut pandangannya belum menemukan “kebebasan” dalam mengaktualisasikan potensi. Hal ini akan menghambat keberhasilan pendidikan itu sendiri.

### **Gerakan Liberalisme : Tantangan dan Kritik**

Liberalisasi pemikiran yang diharapkan memberikan alternatif pemahaman keislaman, dengan berbagai gerakannya, termasuk Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), tidak selamanya berjalan mulus. Bahkan Ulil Abshar Abdalla sendiri sebagai pegiat JIL, dalam hal ini tidak jarang menyatakan bahwa

---

<sup>43</sup>J.I.G.M. Drost, S.J. *Sekolah : Mengajar atau Mendidik?* (Yogyakarta : Kanisius, 1998), 76.

<sup>44</sup>Ibid, 77

<sup>45</sup>Ibid, 78.

gerakan JIL di Indonesia telah gagal. Hal ini dikarenakan, setidaknya, *pertama* para pegiat Islam liberal gagal berinteraksi dengan masyarakat awam, mereka hanya mampu berargumentasi dengan kaum intelektual dan masyarakat kampus, sedangkan masyarakat Indonesia masih setia dengan paham doktrinasi ajaran agama. *Kedua*, gerakan Islam liberal memperoleh resistensi yang begitu kuat dari masyarakat. Resistensi dilakukan masyarakat karena konsep keberagaman yang ditawarkan pegiat Islam liberal begitu asing dan “aneh” bagi masyarakat *grass root*. Lebih jauh lagi, tidak jarang masyarakat memvonis gerakan liberalisme dengan hukum “sesat” dan harus dihindari.

*Ketiga*, di masyarakat intelektual sendiri, gerakan ini gagal mempertemukan gagasannya dengan bukti sikap yang mencerminkan kebesaran Islam. Tidak jarang mereka tampil dengan argumentasi yang seadanya dan justru ditopang dengan sikap keagamaan yang “jauh” dari tradisi di masyarakat pada umumnya. Kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang akhir-akhir ini justru semakin marak, telah membuktikan kegagalan gerakan liberalisasi pemahaman keagamaan.<sup>46</sup> Selain itu, kegagalan gerakan Islam di liberal di Indonesia, menurut Ulil, juga disebabkan kegagalan dalam membuat piranti organisasi yang sistematis.<sup>47</sup>

Lebih jauh lagi, gerakan Islam liberal di Indonesia telah dicurigai sebagai gerakan yang memisahkan umat dari akar budaya tradisi. Dalam hal ini tidak jarang dijumpai sekelompok orang yang mengatasnamakan kebebasan beragama, justru melakukan sesuatu yang jauh dari anjuran agama itu sendiri. Ini yang memicu resistensi kaum tradisional. Di sisi lain, kaum tradisional-fundamentalis menuduh gerakan liberalisasi sebagai upaya terselubung yang dilakukan negara-negara Barat untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya yang suci. Upaya itu harus dicegah. Dalam hal ini, Syamsuddin Arif mengatakan bahwa orang yang menganut paham liberalisme adalah manifestasi dari kata *nifaq* atau *munafiq*, karena di satu sisi mereka tidak mau dikatakan *kafir*, tetapi di sisi lain mereka tidak berkomitmen dalam melaksanakan ajaran agama.<sup>48</sup>

### C. Penutup

Sebagai varian dari wacana pemikiran keagamaan, Islam liberal telah sedikit banyak memberikan nuansa baru bagi cakrawala berpikir umat Islam. Tentu saja gerakan

---

<sup>46</sup>Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, 358.

<sup>47</sup>Disarikan dari <http://muslimdaily.net/opini/wawasanislam/islam-liberal-sekularis-berkedok-muslim.html#.UZ8IWVlgXxE>. Diakses 26 Mei 2013.

<sup>48</sup>Syamsuddin Arif adalah peneliti INSISTS di Frankfurt, Jerman. Baca Syamsuddin Arif, ”Memahami Liberalisme Akhir Zaman” dalam [www.akhirzaman.info/menokonspirasi/](http://www.akhirzaman.info/menokonspirasi/), diakses 7 Juni 2013.

ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai sarjana muslim, sudah selayaknya para pemikir mengambil yang terbaik dari gerakan ini, di samping turut serta aktif untuk membenahi kekurangan-kekurangannya.\*

## BIBLIOGRAPHY

- Abdalla, Ulil Abshar. "Pendidikan Islam Liberal Tidak Mengajarkan Fanatisme Buta" dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. I Thn. X. Desember 2002.
- Abdullah, Amin. "Pengantar : Dinamika Agama Antara Profanitas dan Sakralitas" dalam Moh. Shofan. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.
- Abu Zayd, Nashr Hamid. *al-Imam al-Shafi'iy wa Ta'sis al-Ideolojiyat al-Wasatiyyat*. Kairo : Daar al Ma'arif, 1992.
- Arif, Syamsuddin. "Memahami Liberalisme Akhir Zaman" dalam [www.akhirzaman.info/menokonspirasi/](http://www.akhirzaman.info/menokonspirasi/), diakses 7 Juni 2013.
- Arkoun, M. *al-Fikr al-Islamy : Qira'at 'Ilmiyyat*, terj. Hasyim Shalih. Beirut : Markaz al-Inma' al-Qawmy, 1990.
- Binder, Leonard. *Islam Liberal Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Coady CAJ. "Distributive Justice" dalam Goodin (ed.), *A Companion To Contemporary Political Philosophy*. tt. : Blacwell Publishing, 1995.
- Drost, J.I.G.M. *Sekolah : Mengajar atau Mendidik?*. Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Kurzman, Charles (ed.). *Liberal Islam A Sourcebook*. New York : Oxford University Press, 1998.
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mujiran, Paulus. *Pernik-Pernik Pendidikan : Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmed. "Shariah and The Basic Human Right" dalam Charles Kurzman (ed.). *Liberal Islam*. Oxford : Oxford University Press, 1998.
- Nata, Abuddin. "Paradigma Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. I Thn. X. Desember 2002.
- Rachman, Budi Munawar. *Islam Pluralis*. Jakarta : Penertbit Paramadina, 2001.

- Rais, Amin. "Kata Pengantar" dalam David Sagiv. *Islam Otentisitas Liberalisme*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta : LKiS, 1997.
- Al-Rayyis, Muhammad Dzia. *al-Islam wa al-Khilafat fi al-Ashr al-Hadits : Naqd al-Kitab al Islam wa Ushul al-Hukm*. Kairo : Maktabah Dar al-Thaqafat, 1972.
- Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*, terj. Muhammad Taufik. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2003.
- Sagiv, David. *Islam Otentisitas Liberalisme*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta : LKiS, 1997.
- Shaik, Sa'diyya. "Transforming Feminim : Islam, Women and Gender Justice" dalam Omid Safi (ed.). *Muslim Progressive On Justice, Gender and Pluralisme*. Oxford : Oneworld, 2003.
- Shofan, Moh. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.
- Sukarna. *Ideologi : Studi Ilmu Politik*. Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
- Thaha, Mahmud Muhammad. "The Second Message of Islam" dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam*. Oxford : Oxford University Press, 1998.
- Tilaar, HAR. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang : Indonesia Tera, 2003.
- Wahib, Ahmad. *Pergerakan Pemikiran: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta : LP3ES, 1983.
- Watt, William Montgomery. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. London : Routledge, 1988.
- [id.wikipedia.org/wiki/liberalismee](http://id.wikipedia.org/wiki/liberalismee), diakses 7 Juni 2013.
- <http://muslimdaily.net/opini/wawasanislam/islam-liberal-sekularis-berkedokmuslim.html>. diakses 26 Mei 2013.
- <http://muslimdaily.net/opini/wawasanislam/islam-liberal-sekularis-berkedok-muslim.html>. diakses 26 Mei 2013.